

## PERTAMBANGAN

### Eksplorasi PT Antam di Luar Hutan Lindung

Kupang, Kompas - Manajemen PT Antam mengakui bahwa sebagian kecil wilayah izin usaha pertambangan eksplorasi penambangan emas di kawasan Desa Waning, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, merupakan wilayah hutan lindung. Namun, kegiatan eksplorasi yang telah dilakukan badan usaha milik negara itu berupa pengeboran melalui enam titik, semuanya di luar kawasan hutan lindung tersebut.

Demikian klarifikasi PT Aneka Tambang (Antam) melalui surat yang ditandatangani Sekretaris Perusahaan Bimo Budi Satryo kepada Kompas, Selasa (23/8).

Seperti diberitakan, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat memastikan tidak akan memproses perpanjangan izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi bagi PT Antam, investor penambangan emas di Desa Waning. Sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Manggarai Barat Rafael Arhat, Senin lalu, salah satu alasannya karena sekitar 2.130 hektar dari 12.070 hektar areal tambang perusahaan itu menyerobot kawasan hutan lindung. Selain itu, masyarakat Desa Waning menolak kehadiran tambang di desa mereka (Kompas, 23/8).

Menurut Bimo, eksplorasi di kawasan itu berdasarkan IUP eksplorasi sesuai dengan SK Bupati Manggarai Barat Nomor 4300/2013/2009 dengan masa berlaku hingga 17 Desember 2011. Diakui pula, pihak PT Antam telah mengajukan perpanjangan IUP kepada Bupati Manggarai Barat dan masih menunggu persetujuan.

Bimo menjelaskan, pengeboran melalui enam titik dilakukan di wilayah perkebunan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari pemilik lahan disertai pemberian kompensasi sesuai peraturan berlaku. "Antam juga telah melakukan kegiatan reklamasi di titik bor eksplorasi tersebut sehingga tidak terjadi kerusakan lingkungan," tutur Bimo yang juga mengakui PT Antam berkomitmen tinggi merealisasikan sistem manajemen lingkungan.

Bupati Manggarai Barat Agus Ch Dula menegaskan, sikapnya menolak tambang di wilayahnya tak hanya karena areal IUP terbukti menyerobot kawasan hutan lindung, tetapi juga karena penolakan masyarakat setempat. "Kami menolak tambang jika kegiatan penambangan berpotensi merusak lingkungan," ujar Agus ketika dihubungi dari Kupang, Senin lalu. (ANS)